

PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH KOTA PEKALONGAN DI ERA ORDE BARU



Arditya Prayogi

PEMBANGUNAN

PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

KOTA PEKALONGAN

DI ERA ORDE BARU



Arditya Prayogi

PEMBANGUNAN

PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

KOTA PEKALONGAN

DI ERA ORDE BARU



Arditya Prayogi



Goresan Pena
Kuningan, 2026

PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH KOTA PEKALONGAN DI ERA ORDE BARU

Kuningan © 2026, Arditya Prayogi

Editor : Dr. Riki Nasrullah, M.Hum

Setting : Goresan Pena Publishing

Penata Isi : C. I. Wungkul

Desain Sampul : C. I. Wungkul

Foto Sampul : canva.com

Hak Cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ke dalam bentuk apapun, secara elektronik maupun mekanis, termasuk fotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya, tanpa izin tertulis dari Penerbit. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Diterbitkan pertama kali oleh :

Goresan Pena

Anggota IKAPI, Jawa Barat, 2016

Jl. Jami no. 230 Sindangjawa – Kadugede – Kuningan

Jawa Barat 45561

Telp./SMS/Whatsapp : 085-221-422-416

IG : @penerbit_gp

Email : goresanpena2012@gmail.com

Website : www.goresanpena.or.id

Referensi | Non Fiksi | R/D

x + 80 hlm. ; 14.5 x 21 cm

ISBN : 978-634-242-389-9

Cet. I, Januari 2026

Apabila di dalam buku ini terdapat kesalahan cetak/produksi atau kesalahan informasi, mohon hubungi penerbit.

KATA PENGANTAR

“Pembangunan tanpa pendidikan ibarat membangun rumah tanpa fondasi, akan runtuh sebelum sempat melindungi penghuninya”

Pendidikan tidak bisa dipersempit hanya pada aktivitas kelas atau kurikulum yang diajarkan guru. Pendidikan adalah agen transformasi sosial yang terus mengalir-alur bagaikan darah kehidupan bangsa, meresap hingga ke pelosok kota dan desa. Pendidikan adalah wajah dari *nation building*, cerminan dari cita-cita kolektif kita tentang masa depan yang hendak dibawa ke mana, sekaligus panggung untuk menguji janji konstitusional Indonesia, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena itu, menuliskan sejarah pembangunan pendidikan tidak cukup jika hanya dengan menghimpun angka-angka statistik kaku dan beku. Di balik setiap angka, sejatinya tersimpan memori kolektif sebuah masyarakat ihwal perjuangan, kesenjangan, hingga harapan akan mobilitas sosial-kultural. Dengan merekonstruksi perjalanan pendidikan, kita sesungguhnya tengah menghidupkan kembali denyut sejarah yang membentuk arah bangsa menuju kemajuan dan kecerah-ceriaan.

Buku *Pembangunan Pendidikan Dasar dan Menengah Kota Pekalongan di Era Orde Baru* ini lahir sebagai jawaban atas kebutuhan kajian historis yang menaut-eratkan data

dengan makna. Arditya Prayogi, dengan latar belakang keilmuan sejarahnya yang kokoh, berhasil menyajikan sebuah karya yang memadukan detail-detail statistik dengan narasi historis yang hidup. Dalam kajiannya ini, Pekalongan—yang selama ini kerap dikenal sebagai “Kota Batik”—dihadirkan dalam bentuk wajah lain, yakni sebuah kota yang bergerak dinamis, bertransformasi melalui kebijakan pendidikan, dan berupaya menemukan pijakan baru dalam pusaran pembangunan Orde Baru.

Era Orde Baru kerap dipahami semata-mata dalam bingkai politik otoritarianismenya. Namun, buku ini mengingatkan kita akan satu hal, bahwa di balik kontroversi kekuasaannya itu, ternyata terdapat proyek pembangunan sosial yang mengekalkan jejak nyata di tingkat lokal-nasional. Pendidikan, pada masa itu – melalui gambaran historikalnya -- tampil sebagai instrumen strategis dalam agenda *nation building*, sekaligus menjadi ruang sunyi tempat negara, pemerintah daerah, masyarakat, hingga keluarga bertemu-bersatu dalam visi bersama, yakni membuka akses belajar bagi generasi penerus bangsa.

Keistimewaan buku ini terletak pada keberanian penulis dalam memperlakukan data statistik sebagai teks sejarah (*historical text*). Deretan angka mengenai jumlah sekolah, murid, dan guru tidak dibiarkan membeku kaku dalam tabel-tabel yang kering, melainkan diolah menjadi narasi yang merekam dampak sosial, kendala struktural,

hingga perubahan kultural masyarakat Pekalongan. Pada titik inilah buku ini menemukan keunikannya. Buku ini tidak hanya menyajikan *apa yang terjadi*, tetapi juga menyingkap *mengapa* dan *bagaimana* dinamika pendidikan itu berlangsung, sehingga menghadirkan historiografi yang hidup dan bermakna.

Sebagai editor, saya melihat buku ini memiliki signifikansi yang cukup tajam, baik untuk akademisi sejarah maupun pihak lain yang memiliki ketertarikan pada aspek pendidikan, sosial, kultural, dan kebijakan publik. Karya ini juga sangat relevan bagi praktisi pendidikan, pengambil kebijakan, maupun masyarakat luas yang ingin menelusuri bagaimana pendidikan di daerah tumbuh subur dalam pusaran dinamika nasional. Sekali lagi, Pekalongan dihadirkan sebagai studi kasus yang konkret yang menjadi cerminan bagaimana kebijakan pusat diterjemahkan dan diejawantahkan pada level lokal, lengkap dengan kompleksitas dan tantangannya. Dari pengalaman inilah, kita dapat belajar bahwa pembangunan pendidikan bukanlah agenda sepihak, melainkan proyek kolektif yang keberhasilannya akan sangat ditentukan oleh kekuatan sinergi antara negara dan masyarakat.

Akhirnya, saya berharap buku ini hadir untuk memperkaya pengetahuan dan literatur dan sekaligus juga menjadi sumber inspirasi bagi generasi masa kini. Belajar dari sejarah tidak boleh berhenti pada nostalgia semata, melainkan mesti menjadi bekal reflektif untuk merancang

pendidikan yang lebih adil, inklusif, dan relevan dengan tantangan zaman. Dengan cara itu, sejarah pembangunan pendidikan di Pekalongan dapat memberikan makna universal, bahwa setiap upaya lokal sesungguhnya menyumbang bagi narasi besar untuk kemajuan bangsa.

Sebagaimana diingatkan Paulo Freire, *“Pendidikan tidak mengubah dunia. Pendidikan mengubah manusia, dan manusialah yang akan mengubah dunia”*.

Maka, dengan membaca buku ini, kita dapat menengok secara lebih dalam tentang sejarah pendidikan Pekalongan di masa Orde Baru dan sekaligus dapat menimba hikmah tentang bagaimana pendidikan, dalam segala keterbatasannya, tetap menjadi jalan terang dan lapang untuk menyiapkan manusia dan bangsa menghadapi masa depan.

Surabaya, 2025

Editor

Riki Nasrullah

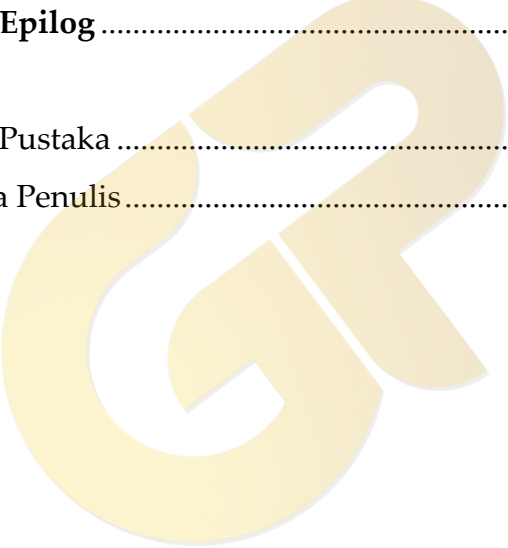
DAFTAR ISI

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	ix
BAB 1 Prolog	1
BAB 2 Orde Baru dan Pembangunan Pendidikan	
2.1 Orde Baru dan Repelita.....	15
2.2 Pembangunan dan Indeks Pembangunan Manusia	24
2.3 Orde Baru dan Pembangunan Pendidikan	26
BAB 3 Dampak dan Dinamika Pembangunan Pendidikan di Kota Pekalongan	
3.1 Perubahan Sosial Pendidikan di Kota Pekalongan	30
3.2 Tantangan dan Kendala Pembangunan Pendidikan di Kota Pekalongan	33
3.3 Peran Pemerintah Kota dan Masyarakat dalam Pembangunan Pendidikan di Kota Pekalongan	36
3.4 Evaluasi Implementasi Kebijakan Pendidikan di Kota Pekalongan era Pelita V	39

BAB 4 Pembangunan Pendidikan di Kota Pekalongan Pada Pelita V

4.1 Gambaran Umum Pendidikan di Kota Pekalongan pra Pelita V	42
4.2 Kebijakan Pendidikan Era Pelita V	47
4.3 Dinamika Pembangunan Pendidikan Dasar dan Menengah Kota Pekalongan di Era Orde Baru (Pelita V 1989-1994)	57

BAB 5 Epilog



Daftar Pustaka	74
Biodata Penulis	80

BAB 1

PROLOG

Setiap kota terus berdinamika, baik cepat atau pun lambat (Abdullah, 2005). Dinamika suatu kota sangat berkaitan dengan manusia yang menghuninya. Gerak langkah manusia sebagai penghuni kota sangat dipengaruhi oleh aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah kota. Dinamika perkembangan kota, yang dalam hal ini berarti kualitas manusia penghuninya dapat diukur dengan alat ukur yang disebut dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) diketengahkan oleh UNDP (*United Nations Development Program*) pada tahun 1990 yang mengukur tingkat kemajuan suatu wilayah dengan melihat pada tiga aspek, yaitu ekonomi, kesehatan, dan Pendidikan (Siagian, 1982). Ulasan terkait IPM menjadi hal yang menarik karena ketiga aspek IPM, yaitu ekonomi, kesehatan, dan pendidikan sangat berkaitan dengan kebijakan pemerintah.

Ulasan mengenai aspek IPM dalam suatu wilayah masih sering menjadi domain ilmu sosial ekonomi, utamanya ilmu ekonomi pembangunan. Namun demikian, sejarah juga dapat menempatkan diri sebagai suatu ilmu yang mengkaji aspek IPM suatu wilayah, utamanya terkait dengan dinamika manusia didalamnya yang berkaitan erat dengan sejarah pembangunan. Dalam hal ini, tentu dibutuhkan pendekatan tersendiri agar sejarah dapat menangkap makna dari data-data pembangunan (berupa statistik IPM) agar karya sejarah yang terbangun (historiografi) dapat secara utuh tergambar (Prayogi, 2022).

Pembahasan IPM oleh sejarawan tentu akan berakhir pada karya kualitatif yang berangkat dari data kuantitatif. Selain itu, ulasan sejarah (historiografi) kota yang mengambil kajian dari aspek IPM juga masih jarang ditemukan. IPM masih merupakan hal baru dalam ilmu sejarah. Semua sumber untuk IPM adalah data statistik, Hal ini menjadi sesuatu yang menarik karena data statistik yang ada tidak dapat dicerna begitu saja oleh masyarakat umum. Secara konseptual, data-data terkait IPM tidak bisa ditarik ke tahun-tahun sebelum adanya IPM. Namun, ketiga indikatornya, yaitu kesehatan, pendidikan, dan ekonomi dapat ditarik ke belakang.

Kota Pekalongan (dalam laporan ini digunakan pula istilah Kotamadya Pekalongan) adalah salah satu kota yang menggunakan IPM sebagai alat ukur perkembangan kota. Data-data indikator statistik IPM Kota Pekalongan terdapat dalam buku seri yang berjudul Kota Pekalongan dalam Angka dan Provinsi Jawa Tengah dalam Angka yang merupakan bagian dari seri penerbitan Badan Pusat Statistik (BPS). Buku ini memuat data statistik yang sangat komprehensif meliputi berbagai data statistik geografi, pemerintahan, penduduk dan ketenagakerjaan, sosial, pertanian, perindustrian dan energi, perdagangan, transportasi, komunikasi, dan pariwisata, keuangan dan harga-harga, serta pendapatan regional. Seluruh data yang ada dalam seri penerbitan ini berupa data statistik.

Tiga aspek yang digunakan untuk mengukur IPM pun dimuat dalam buku ini. Tiap tahunnya data-data ini senantiasa mengalami perubahan. Perubahan data tersebut terjadi tergantung kepada kebijakan pemerintah kota. Secara konseptual, perubahan angka-angka statistik ini tidak banyak diulas. Di sisi lain, kebijakan pemerintah sangat mempengaruhi terjadinya perubahan yang kemudian direkam dalam angka

statistik. Dinamika seperti ini kemudian tidak dimuat dalam seri penerbitan dari Badan Pusat Statistik yang cenderung sinkronis. Hal demikianlah yang menjadi latar belakang dalam buku ini. Selain itu, buku ini bertujuan untuk memberikan telaah pada berbagai data statistik tersebut yang dengannya dapat tergambarkan suatu historiografi dengan cerita yang utuh. Di antara tiga aspek IPM, buku ini fokus pada pembahasan di bidang pendidikan. Alasannya adalah karena pendidikan adalah dasar bagi kemakmuran ekonomi dan kesehatan. Perlu pula diingat, bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia salah satunya berasal dari sumbangsih kelas intelektual-terdidik.

Pada umumnya pembangunan merupakan salah satu isu yang paling menarik dalam suatu pemerintahan, sehingga baik pemerintah pusat maupun daerah selalu menetapkan beberapa program pembangunan di wilayahnya masing-masing. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai target dalam proses pembangunan. Adanya pembangunan diharapkan akan terjadi suatu perubahan yang lebih baik dari periode sebelumnya. Paradigma pembangunan di Indonesia mengalami perkembangan sejak tahun 1960 sampai dengan saat ini. Pada kurun waktu 1960-1970, pemerintah menekankan pada paradigma pertumbuhan ekonomi dalam pembangunan (Hidayat, 2004). Pada tahap selanjutnya terjadi pergeseran ke arah pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan, karena paradigma pertumbuhan ekonomi justru menimbulkan kesenjangan antara golongan yang kaya dengan golongan miskin.

Dalam praktiknya, kebijakan yang diambil oleh pemerintahan Orde Baru dalam bidang pendidikan selalu berbanding lurus dengan tujuan nasional. Pembangunan nasional di masa Orde Baru merupakan sebuah konsep

pembangunan manusia Indonesia sepenuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Secara luas pemerintah Orde Baru dapat dikatakan menjalankan kebijakan pendidikan nasionalnya pada Pelita II hingga Pelita VI. Namun demikian, pembangunan Pendidikan banyak difokuskan pada Pelita V dimana terdapat dua tujuan Pelita V, yaitu pertama, meningkatkan taraf hidup, kecerdasan, dan kesejahteraan seluruh rakyat secara merata dan kedua, meletakkan landasan yang kuat untuk tahap pembangunan selanjutnya.



Kerangka pikir demikian membantuk dalam menarik pemahaman bahwa dalam upaya menjalankan kebijakan pembangunan dalam Pelita, diperlukan peran negara (pemerintahan) yang dalam konteks pendidikan dapat diartikan sebagai upaya menjamin keberlangsungan pendidikan bagi warga negaranya. Negara dalam hal ini harus menyelenggarakan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan warganya. Negara juga harus menjamin setiap warga negara, tanpa kecuali untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Di Indonesia, jaminan pendidikan tersebut tertuang dalam UUD 45 pasal 31 yang menyatakan bahwa warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Oleh karena itu, negara harus memberikan akses yang terbuka kepada setiap warganya untuk mendapatkan pendidikan. Dalam hal ini, yang menjadi titik tekan utama ialah akses terhadap pendidikan dasar dan

menengah, dimana kedua akses pendidikan ini sendiri adalah dasar maupun pondasi bagi keberlangsungan pendidikan di tahap selanjutnya. Untuk itulah, dibutuhkan akses pendidikan yang berarti hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan dasar dan menengah (wajib belajar).

Melihat kondisi tersebut, selama kurun waktu 1970-1980 pemerintah Indonesia berupaya keras untuk menerapkan paradigma pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia, dengan menerapkan program-program pembangunan kepada daerah-daerah miskin dan pelosok-pelosok desa untuk mengejar ketertinggalan (Sari & Purhadi, 2021). Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) merupakan salah satu rencana pemerintah dalam rangka meningkatkan proses pembangunan. Rencana pembangunan tersebut dilakukan setiap lima tahun sekali secara berkesinambungan. Mulai dari Repelita pertama, Repelita kedua, Repelita ketiga, Repelita keempat, dan Repelita kelima (Rahmawati, 2022).

Aspek spasial dalam buku ini ialah kota Pekalongan. Kota Pekalongan memiliki sejarah yang panjang. Keterkaitan kota Pekalongan dengan aspek pendidikan (formal) sejatinya telah dimulai pada masa Hindia-Belanda. Dimana Kota Pekalongan telah diberikan hak otonomi sebagai *Gewest/Residensi* yang membawahi berbagai *Afdeling* (setingkat Kabupaten). Pendirian *Europees School* di Pekalongan pada medio 1820 menjadi bukti awal pemerintah Hindia-Belanda di bidang pendidikan kala itu (Moehadi, et al., 1981). Sebagai konsekuensi dari pembangunan kota pusat administrasi dan pemerintahan, maka kebutuhan akan tenaga kerja terdidik menjadi meningkat. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan itu, pemerintah Hindia-Belanda kemudian membangun berbagai

BAB 2

ORDE BARU DAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN

2.1 Orde Baru dan REPELITA

Pembangunan nasional selalu menjadi agenda dari setiap era kepemimpinan di Indonesia, sama halnya dengan era kepemimpinan Orde Baru. Kepemimpinan Orde Baru berlangsung kurang lebih tiga puluh dua tahun lamanya. Karena meskipun pemimpin Orde Baru, Soeharto, baru ditetapkan secara sah sebagai Presiden Indonesia pada 1968, di tahun sebelumnya Orde Baru sudah mulai memimpin pemerintahan di Indonesia. Kepemimpinan awal Orde Baru di mulai dengan mengatasi masalah ekonomi yang ditinggalkan oleh era pemerintahan sebelumnya. Orde Baru berhasil mengatasi kemerosotan ekonomi dengan upaya stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi pada awal masa kepemimpinan. Di mana upaya tersebut berhasil menekan laju inflasi serta memulihkan perekonomian pada masa itu (Piliang, 2023).

Dalam tiga puluh dua tahun lamanya era pemerintahan Orde Baru, telah banyak kebijakan-kebijakan serta program yang diciptakan di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Kebijakan serta program dilaksanakan berdasarkan dengan konsepsi Orde Baru yang disebut sebagai trilogi pembangunan. Konsepsi trilogi pembangunan di nilai menjadi sebuah konsep ideal untuk Indonesia oleh pemerintahan era Orde Baru. Di mana konsepsi tersebut terdiri atas tiga hal, yaitu: (1) pemerataan pembangunan; (2) pertumbuhan ekonomi; dan (3) stabilitas nasional. Ketiga hal tersebut dipegang teguh oleh

pemerintahan Orde Baru dalam setiap langkah membuat serta menetapkan sebuah kebijakan (Mayrudin, 2018).

Istilah Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun) muncul sebagai salah satu wujud dari program pemerintah yang sesuai dengan konsepsi trilogi pembangunan. Repelita menjadi sebuah program yang dilaksanakan sejalan dengan berlangsungnya era kepemimpinan Orde Baru. Program Repelita mencakup berbagai macam pelaksanaan kebijakan-kebijakan dalam segala bidang. Pelaksanaan Repelita sendiri terdiri dari enam sesi, dengan masing-masing tujuan dari pelaksanaannya sendiri. Di mana tujuan dari pelaksanaan Repelita tersebut dapat diubah dan ditetapkan sesuai dengan kepentingan pemerintah era Orde Baru sendiri. Dengan demikian, antara program Repelita satu dengan selanjutnya terus mengalami perubahan, baik dari segi proses maupun tujuan pelaksanaannya (Rahmawati, 2022).

Program pembangunan nasional dituangkan kedalam suatu perencanaan bertahap, yakni pembangunan jangka panjang 25 tahun dan pembangunan Lima Tahun Pelita. Pada masa Orde Baru pemulihan dan pembangunan ekonomi nasional mendapat prioritas utama, yang memerlukan prasyarat penciptaan stabilitas politik. Kebutuhan akan biaya pembangunan sebagian besar, pada awalnya diperoleh dari bantuan luar negeri. Susunan kabinet sebagai pengemban dan pelaksana program pembangunan lebih bersifat *zaken*. Pada 15 Juni 1968, Presiden Soeharto menunjuk sebuah tim yang terdiri dari 8 ahli dan teknokrat berlatarbelakang pendidikan barat. Mereka disertai tanggung jawab untuk memonitor atau mengatur perkembangan dan trend ekonomi. Selain itu opini, rencana dan rekomendasi mereka juga diharapkan dapat membenarkan arah pembangunan ekonomi. Hasil pemikiran

para pakar tersebut dituangkan dalam bentuk Rencana Pembangunan Lima Tahun Repelita (Leirissa, Ohorella, & Tangkilisan, 1996: 89).

Pemerintah selanjutnya menyiapkan Rencana Pembangunan Lima Tahun atau Repelita. Program ini disiapkan dan dimulai pada 1 April 1969. Periodisasi pembangunan setiap lima tahun ini dilandasi oleh kesadaran bahwa pembangunan berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Setiap tahun akan ditentukan titik berat ke sektor tertentu, disesuaikan dengan tingkat perkembangan ekonomi. Pada November 1968, Presiden Soeharto memimpin langsung rapat Paripurna Kabinet Pembangunan Pertama. Pemerintah mempunyai rencana pembangunan yang dikelompokkan berdasarkan jangka waktu seperti berikut:

1. Rencana untuk pembangunan jangka panjang dengan periode 25 tahun atau PJP.
2. Rencana pembangunan jangka menengah dengan periode 5 tahun Repelita.
3. Rencana jangka pendek tahunan yang tertuang dalam RAPBN.

Masalah pokok yang dibahas selanjutnya adalah laporan Ketua Bappenas Prof. Dr. Widjojo Nitisastro tentang persiapan penyusunan Program Pembangunan Jangka Panjang Pertama atau PPJP tahap I yang akan dimulai 1 April 1969 sampai 31 Maret 1994. Sementara PJP tahap II direncanakan mulai dari 1 April 1994 sampai dengan 31 Maret 2019. Di bawah ini merupakan tujuan Pelita pada PJP tahap I (Alam & Sarimaya, 2017).

Repelita I (1969-1974) bertujuan memenuhi kebutuhan dasar dan infrastruktur dengan penekanan pada bidang pertanian. Repelita I diawali sejak tanggal 1 April tahun 1969. Tujuan dari pelaksanaan yaitu untuk menaikkan taraf hidup rakyat juga menaruh dasar-dasar pembangunan tahap selanjutnya. Pelaksanaan Repelita I tersebut meletakkan sasaran pada pangan, sandang, perbaikan prasarana, perumahan rakyat, perluasan lapangan pekerjaan, dan kesejahteraan masyarakat di bidang kerohanian. Sasaran-sasaran pembangunan tersebut dititikberatkan pada pembangunan di bidang pertanian dengan melakukan pembaruan terhadap kegiatan pertanian rakyat. Hal tersebut bertujuan untuk mengatasi keterbelakangan ekonomi masyarakat yang pada saat itu masih hidup dengan mengandalkan hasil pertanian. Di dalam pelaksanaan Repelita I ini kehidupan masyarakat mengalami perubahan dari yang semula berpusat pada pertanian tradisional berkembang menuju pertanian modern.

Pelaksanaan Repelita I mencakup berbagai bidang, diantaranya dalam bidang ekonomi pemerintah Orde Baru berambisi mengubah susunan ekonomi masyarakat Indonesia. Pemerintah melalui Repelita I berupaya memperkecil perbedaan antara sektor agraris dengan sektor industri. Hal tersebut karena pada masa itu ekonomi masyarakat Indonesia lebih condong ke arah sektor agraris. Di mana kemudian menjadi salah satu penyebab kelemahan perekonomian Indonesia. Pemerintah pada masa itu memanfaatkan sektor industri untuk meningkatkan hasil produksi serta mutu sektor pertanian yang di dalamnya juga termasuk perkebunan. Dengan demikian sektor industri juga mengalami perkembangan sejalan dengan perkembangan dalam sektor agraris.

Kemudian di dalam bidang pendidikan, pelaksanaan Repelita I menitikberatkan pendidikan pada penciptaan tenaga kejuruan serta tenaga teknik dalam upaya menyokong usaha pembangunan. Lalu dalam bidang kerohanian, pemerintah melaksanakan pembangunan dalam rangka pembinaan nilai dan martabat rakyat Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Upaya tersebut dilakukan oleh pemerintah dengan cara menyediakan buku-buku pelajaran serta kitab-kitab suci semua agama yang ada di Indonesia, serta diadakan pula upaya rehabilitasi dan pembangunan tempat ibadah. Serangkaian rencana pembangunan tersebut tersusun dalam sebuah proyek pembangunan. Pemerintah Orde Baru menyebarkan proyek-proyek pembangunan tersebut pada setiap daerah dengan memanfaatkan kekayaan alam yang ada, dan menyesuaikan kondisi serta potensi ekonomi daerah yang bersangkutan. Sehingga proses pembangunan tersebut dapat berlangsung dan mencakup sebagian besar wilayah yang ada di Indonesia. Program Repelita I ini berakhir pada tanggal 31 Maret tahun 1974. Pelaksanaan Repelita I banyak mencapai sasaran-sasaran yang sebelumnya telah ditentukan. Di sisi lain juga terdapat banyak kendala serta kekurangan selama Repelita I berlangsung.

Repelita II (1974-1979) bertujuan meningkatkan pembangunan di pulau-pulau selain Jawa, Bali, dan Madura, di antaranya melalui transmigrasi. Program Repelita II diawali pada tanggal 1 April 1974 dengan menjadikan kesuksesan Repelita I sebagai tolak ukur pelaksanaan. Terdapat setidaknya lima cakupan sasaran yang diharapkan terwujud pada Repelita II, diantaranya, terdiri dari: (1) tersedianya bahan pangan dan sandang yang cukup; (2) tersedianya perumahan serta fasilitas lain; (3) meluasnya sarana dan prasarana; (4) meratanya kesejahteraan rakyat; dan (5) meluasnya kesempatan kerja.

Dalam rangka mewujudkan kelima sasaran tersebut, pemerintah Orde Baru berupaya meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Di mana terdapat peningkatan produksi di berbagai macam sektor, baik sektor pertanian, industri, pertambangan, atau pun sektor-sektor lainnya.

Peningkatan produksi pada berbagai sektor tersebut melahirkan struktur perekonomian Indonesia menjadi lebih kuat, dan bermanfaat sebagai landasan pembangunan di tahap selanjutnya. Kemudian salah satu dampak yang dihadirkan adalah meluasnya lapangan pekerjaan. Meluasnya lapangan pekerjaan tersebut sangat bermanfaat karena memang pada masa itu terjadi kenaikan jumlah penduduk Indonesia yang sangat signifikan. Sehingga pemerintah pada Repelita II ini mengupayakan program transmigrasi untuk terwujudnya pemerataan penduduk, terutama kegiatan pemindahan penduduk dari pulau Jawa ke pulau Sumatra, Kalimantan serta pulau-pulau lain yang belum banyak dihuni oleh masyarakat Indonesia.

Dalam bidang pendidikan, pemerintah berhasil melampaui target yang sebelumnya ditentukan. Banyak Gedung-gedung sekolah baru dibangun, meningkatnya mutu pendidikan, pengangkatan guru, serta tersedianya buku-buku pelajaran. Tidak ketinggalan bidang komunikasi Indonesia pada masa itu juga mengalami peningkatan, seperti adanya satelit Palapa yang memperlancar komunikasi setiap penjuru Indonesia. Dengan demikian pelaksanaan Repelita II yang berakhir pada 31 Maret 1979 juga dinilai sukses dan melampaui target yang telah ditentukan.

Repelita III (1979-1984) menekankan bidang industri padat karya untuk meningkatkan ekspor. Pada jalur pemerataan kebutuhan masyarakat, pemerintah Orde Baru melakukan

BAB 3

DAMPAK DAN DINAMIKA

PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DI KOTA

PEKALONGAN

3.1 Perubahan Sosial dan Pendidikan di Kota Pekalongan

Pembangunan pendidikan di Kota Pekalongan selama periode Pelita V (1989-1994) membawa perubahan sosial yang signifikan, terutama dalam hal peningkatan akses pendidikan dasar dan menengah. Berdasarkan kebijakan nasional yang menekankan pemerataan pendidikan, Kota Pekalongan mengalami pertumbuhan jumlah sekolah serta peningkatan jumlah peserta didik. Program pembangunan ini sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat yang menargetkan perluasan kesempatan belajar bagi anak usia sekolah, sebagaimana tercermin dalam berbagai kebijakan pendidikan pada era Orde Baru (Tilaar, 1995). Pekalongan sebagai kota dengan posisi strategis di jalur pantai utara Jawa, memiliki keunggulan dalam akses terhadap berbagai sumber daya pendidikan yang memungkinkan program pemerataan pendidikan lebih efektif dibandingkan daerah lain yang lebih terpencil.

Perubahan ini tidak hanya sebatas pada kuantitas sekolah dan jumlah siswa, tetapi juga berdampak pada struktur sosial masyarakat Kota Pekalongan. Meningkatnya akses pendidikan, menyebabkan terjadinya perubahan dalam pola pikir masyarakat terhadap pentingnya pendidikan sebagai sarana mobilitas sosial. Sebelumnya, sebagian besar masyarakat Kota Pekalongan masih bergantung pada sektor industri dan

perdagangan, terutama dalam bidang tekstil dan perikanan (Sabana, 2007). Namun, dengan meningkatnya angka partisipasi sekolah, mulai muncul kecenderungan baru di mana pendidikan dianggap sebagai faktor penting untuk meningkatkan taraf hidup, membuka akses terhadap pekerjaan yang lebih beragam, dan mengurangi ketergantungan terhadap sektor ekonomi tradisional.

Jika dilihat dari konteks kebijakan pendidikan nasional, upaya pemerataan pendidikan yang dicanangkan dalam Pelita V berhasil meningkatkan angka partisipasi sekolah dasar dan menengah, tetapi masih menghadapi tantangan besar dalam aspek kualitas pendidikan. Seperti yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia pada masa Orde Baru, pembangunan pendidikan lebih menekankan pada aspek kuantitatif, seperti peningkatan jumlah sekolah dan guru, dibandingkan dengan peningkatan kualitas pengajaran dan kurikulum (Anwar, 2010). Kota Pekalongan mengalami kondisi serupa, di mana meskipun jumlah siswa yang bersekolah meningkat, kualitas pendidikan masih menghadapi kendala akibat minimnya fasilitas, terbatasnya tenaga pengajar yang berkualifikasi tinggi, serta ketimpangan akses pendidikan antara daerah perkotaan dan pinggiran.

Selain itu, perubahan sosial yang terjadi juga berkaitan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pendidikan perempuan. Pada awal era Orde Baru, pendidikan bagi anak perempuan masih menghadapi berbagai tantangan, terutama karena adanya anggapan bahwa peran utama perempuan berada di ranah domestik (Blackburn, 2004). Namun, dengan adanya program wajib belajar dan kampanye pemerintah tentang pentingnya pendidikan bagi semua anak - meski tidak dijelaskan latar jenis kelaminnya, angka partisipasi

pendidikan di Kota Pekalongan dapat dikatakan meningkat selama periode Pelita V. Perubahan ini dapat mencerminkan tren secara nasional di mana perbedaan angka partisipasi sekolah antara laki-laki dan perempuan mulai menurun pada dekade 1990-an (Jones & Hull, 1997).

Di sisi lain, dinamika sosial yang muncul sebagai akibat dari peningkatan akses pendidikan juga melahirkan tantangan baru, terutama dalam aspek pengangguran terdidik. Dengan semakin banyaknya lulusan sekolah menengah, terjadi kesenjangan antara keterampilan yang diperoleh di sekolah dan kebutuhan dunia kerja di Kota Pekalongan. Sebagaimana yang dicatat oleh sejarah ekonomi Indonesia pada era Orde Baru, kebijakan pendidikan cenderung kurang memperhatikan aspek vokasional, sehingga banyak lulusan sekolah menengah yang tidak memiliki keterampilan yang cukup untuk langsung masuk ke dunia kerja (Darmaningtyas, 2004). Kota Pekalongan, yang secara ekonomi masih didominasi oleh sektor industri kecil dan menengah, menghadapi tantangan dalam menyerap lulusan pendidikan menengah ke dalam lapangan pekerjaan yang tersedia.

Perubahan sosial yang terjadi sebagai dampak dari pembangunan pendidikan di Kota Pekalongan selama Pelita V menunjukkan bahwa pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen peningkatan angka melek huruf, tetapi juga sebagai pendorong perubahan dalam struktur masyarakat. Namun, perubahan ini tidak serta-merta membawa hasil yang sepenuhnya positif tanpa adanya kendala. Ketimpangan dalam akses dan kualitas pendidikan, ketidakseimbangan antara pendidikan dan lapangan kerja, serta dinamika sosial akibat perubahan pola pikir masyarakat menjadi tantangan yang harus

diatasi dalam periode pembangunan berikutnya. Oleh karena itu, pengalaman Kota Pekalongan selama era Pelita V memberikan gambaran penting tentang bagaimana kebijakan pendidikan dapat membentuk masyarakat, tetapi juga memerlukan evaluasi yang mendalam agar hasilnya lebih berkelanjutan dan inklusif.

3.2 Tantangan dan Kendala Pembangunan Pendidikan di Kota Pekalongan

Pembangunan pendidikan di Kota Pekalongan selama periode Pelita V menghadapi berbagai tantangan, baik dalam aspek infrastruktur, kualitas pengajaran, maupun pemerataan akses pendidikan. Meskipun kebijakan pemerintah pusat telah menargetkan peningkatan jumlah sekolah dan tenaga pengajar, implementasi kebijakan ini di tingkat daerah sering kali terkendala oleh keterbatasan anggaran dan sumber daya. Kebijakan pendidikan pada masa Orde Baru cenderung lebih fokus pada aspek kuantitatif dibandingkan dengan peningkatan kualitas pendidikan itu sendiri (Tilaar, 1995). Kota Pekalongan, sebagai salah satu kota yang hidup dari sektor industri tekstil, menghadapi tantangan dalam memastikan bahwa pertumbuhan pendidikan dapat berjalan seiring dengan kebutuhan ekonomi dan tenaga kerja yang ada di daerah tersebut.

Salah satu kendala utama dalam pembangunan pendidikan di Kota Pekalongan adalah keterbatasan infrastruktur pendidikan, terutama di daerah pinggiran kota. Meskipun terjadi peningkatan jumlah sekolah selama Pelita V, distribusi sekolah masih belum merata, sehingga anak-anak di wilayah tertentu harus menempuh perjalanan yang cukup jauh untuk mengakses pendidikan. Hal demikian pada dasarnya

jamak ditemukan di daerah-daerah di Indonesia dimana kebijakan pembangunan sekolah lebih terpusat di perkotaan dibandingkan dengan daerah pinggiran atau pedesaan (Darmaningtyas, 2004).

Selain keterbatasan infrastruktur, kualitas tenaga pengajar juga menjadi tantangan dalam pembangunan pendidikan di Kota Pekalongan. Pada masa Orde Baru, banyak kebijakan rekrutmen guru yang berorientasi pada pemenuhan jumlah tenaga pendidik tanpa mempertimbangkan secara mendalam aspek kualifikasi dan kompetensi mereka. Hal ini karena secara luas, program pelatihan dan pengembangan guru masih terbatas, sehingga banyak guru yang tidak memiliki kompetensi pedagogis yang memadai untuk mendukung pembelajaran yang berkualitas (Blackburn, 2004). Di Kota Pekalongan, permasalahan ini diperparah oleh rendahnya insentif bagi para tenaga pengajar, terutama di sekolah-sekolah swasta dan di daerah yang kurang berkembang, sehingga terjadi disparitas dalam kualitas pengajaran antara sekolah yang memiliki sumber daya lebih baik dan sekolah yang mengalami keterbatasan.

Selain faktor internal dalam dunia pendidikan, tantangan sosial-ekonomi juga berperan besar dalam menghambat pembangunan pendidikan di Kota Pekalongan. Sebagai kota yang memiliki sektor industri tekstil dan perikanan yang kuat, banyak keluarga yang lebih memprioritaskan anak-anak mereka untuk bekerja membantu ekonomi keluarga daripada melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi (Sabana, 2007). Fenomena ini umum terjadi di banyak wilayah Indonesia pada era Orde Baru, di mana faktor ekonomi keluarga sering kali menjadi hambatan bagi anak-anak untuk menyelesaikan pendidikan mereka (Jones & Hull, 1997).

Akibatnya, angka putus sekolah di tingkat menengah pertama dan atas masih menjadi tantangan di Kota Pekalongan selama periode Pelita V.

Tantangan lainnya adalah minimnya integrasi antara kebijakan pendidikan dan kebutuhan tenaga kerja di Kota Pekalongan. Kurikulum pendidikan pada masa Orde Baru lebih berorientasi pada pendidikan umum dibandingkan dengan pendidikan vokasional atau kejuruan, yang seharusnya dapat memberikan keterampilan langsung kepada lulusan sekolah menengah untuk memasuki dunia kerja (Anwar, 2010). Akibatnya, banyak lulusan sekolah menengah yang tidak memiliki keterampilan yang relevan dengan pasar kerja lokal, yang sebagian besar bergerak di sektor industri kecil dan menengah. Kurangnya sekolah kejuruan yang dapat menyiapkan lulusan dengan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri setempat menjadi salah satu faktor yang menyebabkan ketidakseimbangan antara pendidikan dan dunia kerja di Kota Pekalongan.

Secara keseluruhan, pembangunan pendidikan di Kota Pekalongan selama Pelita V menghadapi berbagai kendala yang mencerminkan tantangan nasional dalam implementasi kebijakan pendidikan di era Orde Baru. Keterbatasan infrastruktur, rendahnya kualitas tenaga pengajar, hambatan sosial-ekonomi, dan kurangnya relevansi pendidikan dengan dunia kerja menjadi faktor utama yang menghambat efektivitas pembangunan pendidikan di kota ini. Oleh karena itu, meskipun terjadi peningkatan jumlah sekolah dan angka partisipasi pendidikan, tantangan yang ada menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan pada masa ini masih membutuhkan perbaikan dalam hal pemerataan akses, peningkatan kualitas, serta keterkaitannya dengan kebutuhan tenaga kerja lokal.

3.3 Peran Pemerintah Kota dan Masyarakat dalam Pembangunan Pendidikan di Kota Pekalongan

Pembangunan pendidikan di Kota Pekalongan selama Pelita V (1989-1994) tidak terlepas dari peran aktif pemerintah daerah dalam mengimplementasikan kebijakan pendidikan nasional serta partisipasi masyarakat dalam mendukung akses dan kualitas pendidikan. Pemerintah Kota Pekalongan bertindak sebagai pelaksana kebijakan pendidikan yang telah dirancang oleh pemerintah pusat, terutama dalam hal pemerataan akses pendidikan dasar dan menengah. Kebijakan pendidikan di era Orde Baru sangat terpusat, namun keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada inisiatif pemerintah daerah dalam menyesuaikan kebijakan dengan kondisi lokal (Tilaar, 1995). Dalam konteks Kota Pekalongan, pemerintah daerah berperan dalam mendirikan sekolah-sekolah baru, meningkatkan jumlah tenaga pengajar, serta memberikan bantuan kepada siswa dari keluarga kurang mampu agar tetap dapat melanjutkan pendidikan.

Salah satu peran utama pemerintah daerah dalam pembangunan pendidikan adalah penyediaan infrastruktur pendidikan yang lebih merata. Pemerintah Kota Pekalongan, melalui kebijakan yang selaras dengan pemerintah pusat, membangun dan merehabilitasi sejumlah sekolah dasar dan menengah untuk meningkatkan daya tampung siswa (Bappenas, 1989). Selain itu, pemerintah juga berupaya memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan, seperti penyediaan buku pelajaran, laboratorium sekolah, dan ruang kelas yang lebih layak. Meskipun demikian, pembangunan infrastruktur pendidikan pada era Orde Baru sering kali lebih mengutamakan aspek kuantitatif daripada kualitas, sehingga

meskipun jumlah sekolah bertambah, tidak selalu diiringi dengan peningkatan mutu pembelajaran yang signifikan (Darmaningtyas, 2004).

Selain pemerintah, masyarakat Kota Pekalongan juga memiliki peran yang penting dalam mendukung pendidikan, terutama melalui kontribusi dari sektor swasta dan organisasi sosial. Sekolah-sekolah swasta dan madrasah Islam turut serta dalam menyediakan akses pendidikan bagi anak-anak yang belum tertampung di sekolah negeri. Pendidikan berbasis masyarakat dan lembaga keagamaan di Indonesia pada era Orde Baru menjadi elemen penting dalam mengatasi keterbatasan sekolah negeri, terutama di daerah-daerah yang memiliki populasi pelajar yang tinggi (Blackburn, 2004). Di Kota Pekalongan, madrasah dan sekolah berbasis keagamaan memainkan peran signifikan dalam meningkatkan angka partisipasi pendidikan, terutama bagi keluarga yang ingin mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan dalam pendidikan anak-anak mereka.

Dukungan masyarakat terhadap pendidikan juga terlihat dalam berbagai bentuk, seperti keterlibatan dalam program orang tua asuh dan gotong royong dalam pembangunan fasilitas sekolah. Program orang tua asuh, yang juga diterapkan di beberapa daerah lain di Indonesia, memungkinkan siswa dari keluarga kurang mampu untuk mendapatkan bantuan biaya pendidikan dari individu atau lembaga sosial (Sabana, 2007). Selain itu, praktik gotong royong dalam membangun atau memperbaiki sarana pendidikan merupakan wujud nyata dari partisipasi masyarakat dalam mendukung pendidikan di Kota Pekalongan. Partisipasi aktif ini menunjukkan bahwa pembangunan pendidikan tidak hanya bergantung pada

kebijakan pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan langsung dari masyarakat.

Namun, meskipun terdapat dukungan yang cukup kuat dari pemerintah daerah dan masyarakat, tantangan tetap muncul dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan. Salah satu permasalahan yang dihadapi adalah kurangnya koordinasi antara pemerintah daerah dan pihak swasta dalam perencanaan pendidikan. Pada era Orde Baru, kebijakan pendidikan cenderung bersifat top-down, sehingga kurang memberikan ruang bagi inisiatif lokal dalam menentukan arah pembangunan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan daerah (Jones & Hull, 1997). Di Kota Pekalongan, hal ini tercermin dalam minimnya sinergi antara sekolah negeri dan sekolah swasta dalam hal standarisasi kurikulum, kualitas tenaga pengajar, serta akses terhadap sumber daya pendidikan yang setara.

Peran pemerintah Kota Pekalongan dan masyarakat dalam pembangunan pendidikan selama Pelita V mencerminkan dinamika interaksi antara kebijakan pusat dan inisiatif lokal. Meskipun ada banyak keberhasilan dalam perluasan akses pendidikan, masih terdapat tantangan dalam hal peningkatan kualitas dan pemerataan sumber daya pendidikan. Oleh karena itu, pengalaman pembangunan pendidikan di Kota Pekalongan pada masa ini menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan pendidikan tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah pusat, tetapi juga pada seberapa baik pemerintah daerah dan masyarakat dapat bekerja sama untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif dan berkualitas.

BAB 4

PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DI KOTA PEKALONGAN PADA PELITA V

4.1 Gambaran Umum Pendidikan Kota Pekalongan Pra Pelita V

Kota Pekalongan adalah salah satu kota di pesisir pantai utara Provinsi Jawa Tengah. Kota ini berbatasan dengan laut Jawa di utara, Kabupaten Pekalongan di sebelah selatan dan barat dan Kabupaten Batang di timur. Kota Pekalongan terdiri atas 4 kecamatan, yakni Pekalongan Utara, Pekalongan Barat, Pekalongan Selatan dan Pekalongan Timur. Kota Pekalongan terletak di jalur pantai Utara Jawa yang menghubungkan Jakarta-Semarang-Surabaya. Kota Pekalongan berjarak 384 km di timur Jakarta dan 101 km sebelah barat Semarang. Kota Pekalongan mendapat julukan Kota Batik. Hal ini tidak terlepas dari sejarah bahwa sejak puluhan dan ratusan tahun lampau hingga sekarang.

Berdasarkan Undang-undang no 16 tahun 1950 yang diubah menjadi undang-undang no 13 tahun 1954, Pekalongan memperoleh status menjadi Kota Besar sehingga lebih berpeluang untuk berkembang secara luas. Di bidang tata pemerintahan dengan keluarnya Undang-undang no 1 tahun 1957 tentang pokok pemerintahan di Daerah, Kota Pekalongan di pimpin oleh seorang Walikota yang bernama M. Soehartono Slamet Poespopranata dimana peran walikota adalah sebagai pejabat pemerintah pusat dan sekaligus sebagai kepala daerah. Secara yuridis formal, Kota Pekalongan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomer 16 Tahun 1950 tanggal 14 Agustus 1950

tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Jawa Barat/Jawa Tengah/Jawa Timur dan Daerah Istimewa Jogjakarta. Selanjutnya dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, maka Pekalongan berubah sebutannya menjadi Kotamadya Dati II Pekalongan.

Secara keadaan sosial di Kota Pekalongan tergolong multi etnis dan agama. Kota Pekalongan juga dikenal sebagai kota religius dengan tingkat religiulitas yang cukup tinggi. Indikator ini cukup bisa dirasakan dari banyaknya kegiatan keagamaan yang dilakukan di Kota Pekalongan. Secara ekonomi, letaknya yang cukup strategis membuat Kota Pekalongan menjadi kota yang pertumbuhan ekonominya cukup pesat dibandingkan kota-kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Letaknya diantara Jakarta dan Surabaya yang strategis dan berada pada jalur pantura, menjadikan Kota Pekalongan, maju dalam perekonomiannya terutama pada bidang tekstil, industri, perikanan dan perumahan. Pada bidang perikanan sendiri. Kota Pekalongan mempunyai pelabuhan perikanan terbesar di Pulau Jawa. Dimana pada pelabuhan ini, sering menjadi transit tujuan dan area untuk melakukan pelelangan hasil tangkapan laut yang langsung dari para nelayan bahkan dari berbagai daerah. Sehingga produsen dan perusahaan para pengolah hasil laut seperti ikan asin, terasi, sarden, dan berbagai kerupuk ikan, mendirikan perusahaannya di Kota Pekalongan (Pemerintah Kota Pekalongan, 2006).

Kota Pekalongan membentang antara $6^{\circ}50'42''$ – $6^{\circ}55'44''$ LS dan $109^{\circ}37'55''$ – $109^{\circ}42'19''$ BT. Berdasarkan koordinat fiktifnya, Kota Pekalongan membentang antara 510,00 – 518,00 Km membujur dan 517,75 – 526,75 Km melintang. Luas Kota Pekalongan adalah 45,25 Km² atau 0,14 % dari luas wilayah

Provinsi Jawa Tengah yang seluas 3254 ribu Km². Jarak terjauh dari Utara ke Selatan mencapai $\pm$ 9 Km, sedangkan dari Barat ke Timur mencapai $\pm$ 7 Km. Secara Administratif (saat ini) Kota Pekalongan terbagi menjadi 4 (empat) Kecamatan yang tiap kecamatan terdiri dari beberapa kelurahan: a. Kecamatan Pekalongan Barat terdiri dari 13 kelurahan. b. Kecamatan Pekalongan Timur terdiri dari 13 kelurahan c. Kecamatan Pekalongan Utara terdiri dari 9 kelurahan d. Kecamatan Pekalongan Selatan terdiri dari 8 kelurahan Di sebelah utara, wilayah Kota Pekalongan berbatasan dengan Laut Jawa, di sebelah selatan dan barat berbatasan dengan Kabupaten Pekalongan, dan disebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Batang (Pemerintah Kota Pekalongan, 2006).

Dengan kondisi spasial demikian, Kota Pekalongan penduduk sejumlah 138.141 jiwa pada tahun 1988 atau satu tahun sebelum dimulainya Pelita V. Pada tahun berikutnya, atau pada tahun awal dimulainya Pelita V pada 1989, terjadi penurunan jumlah penduduk dimana pada tahun ini penduduk Kota Pekalongan berjumlah 137.889 jiwa. Jika dilihat lebih lanjut, penurunan jumlah penduduk di Kota Pekalongan lebih karena adanya migrasi ke luar Kota Pekalongan (Bandiyono & Indrawardani, 2010). Untuk lebih jelas terkait jumlah penduduk dapat lihat tabel di bawah ini:

Tabel 1. Penduduk Kota Pekalongan Tahun 1988-1989

Tahun	Rumah Tangga	Anggota Rumah Tangga		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1988	-	66.513	71.628	138.141
1989	-	66.362	71.572	137.889

Sumber: Kotamadya Pekalongan dalam Angka

Kepadatan penduduk Kota Pekalongan terdapat di wilayah Pekalongan Barat. Penyebabnya adalah wilayah Pekalongan Barat adalah wilayah yang menjadi pusat kegiatan dengan banyaknya fasilitas umum yang dibutuhkan masyarakat. Dalam hal ini wilayah Pekalongan Barat dijadikan wilayah pengembangan pendidikan, sentra industri kerajinan, perhotelan, pusat pemerintahan/ perkantoran, dan pusat gelanggang olah raga (Sabana, 2007).

Lebih lanjut, jumlah penduduk kategori anak yang termasuk dalam kategori anak usia sekolah jika merujuk pada UU no. 4 Tahun 1979 adalah penduduk yang belum mencapai usia 21 tahun. Dalam hal ini, rentang usia anak mencakup anak usia sekolah dari jenjang dasar sampai menengah pertama dan atas atau dari umur 7-20 tahun.

Tabel 2. Penduduk Usia Sekolah Kota Pekalongan Tahun 1988-1989

Tahun	Anggota Rumah Tangga (ART) Anak		Jumlah	Jumlah Penduduk
	Laki-laki	Perempuan		
1988	22.470	23.124	45.594	138.141
1989	22.913	23.847	46.760	137.889

Sumber: Kotamadya Pekalongan dalam Angka

Berdasarkan tabel di atas, jumlah penduduk anak tahun 1988 adalah 45.594 jiwa. Dari jumlah tersebut dapat diketahui bahwa jumlah anak usia sekolah adalah sekitar 33% dari jumlah penduduk di Kota Pekalongan. Pada 1989, jumlah anak usia sekolah adalah 46.760 jiwa. Dalam hal ini terjadi peningkatan jumlah sebanyak 1.166 jiwa. Hal demikian justru berbanding

terbalik dengan jumlah penduduk keseluruhan yang justru mengalami penurunan. Persentase jumlah anak meningkat dari tahun sebelumnya menjadi sekitar 34% dari jumlah penduduk.

Tabel 3. Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Negeri dan Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Kota Pekalongan Tahun 1988

1988	SD	SMTP	SMTA/K	Jumlah
Sekolah	121	21	20	162
Guru	1.001	506	563	2.070
Murid	21.894	8.564	8.801	39.259

Sumber: Kotamadya Pekalongan dalam Angka

Tabel 4. Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Negeri dan Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Kota Pekalongan Tahun 1989

1989	SD	SMTP	SMTA/K	Jumlah
Sekolah	121	21	20	162
Guru	1.010	515	666	2.191
Murid	21.803	8.442	9.093	39.338

Sumber: Kotamadya Pekalongan dalam Angka

Dari tabel di atas, didapatkan gambaran mengenai kondisi penting pendidikan di Kota Pekalongan pra Pelita V, berupa aspek jumlah sekolah, guru, dan murid. Dalam hal ini, jumlah sekolah yang termaktub mencakup sekolah swasta dan negeri. Namun, tidak terdapat keterangan apakah sekolah tersebut merupakan sekolah umum dan sekolah agama (dalam

hal ini berupa madrasah), termasuk pula tidak terdapat keterangan apakah guru dan siswa juga mencakup guru dan siswa madrasah. Hal ini mengingat sekolah di jenjang madrasah pada dasarnya sama dengan sekolah umum dan yang membedakannya hanya kepengelolaannya yang ada di bawah Departemen (saat ini Kementerian) Agama.

Jenjang SD/ sederajat di Kota Pekalongan memiliki jumlah sekolah, guru dan murid terbanyak jika dibandingkan dengan jenjang SMTP dan SMTA. Yang menarik, jumlah siswa yang menempuh sekolah, baik di SD, SMTP, dan SMTA ternyata jumlahnya tidak sampai setengah dari jumlah anak usia sekolah di tahun yang sama. Artinya, terdapat *problem* partisipasi sekolah (formal) di Kota Pekalongan pada pra Repelita V.

Dapat pula diketahui terkait rasio pendidikan, utamanya rasio antara guru dan murid. Dalam hal ini rasio antara guru dan murid di tingkat SD pada 1988 sebesar 1:22. Pada tingkat SMTP sebesar 1:17 dan pada tingkat SMA sebesar 1:16. Pada tahun 1989, rasio di tingkat SD sebesar 1:21, di tingkat SMTP sebesar 1:16, dan di tingkat SMTA sebesar 1:14. Kondisi demikian paling tidak menggambarkan bahwasanya kondisi pendidikan di Kota Pekalongan pra Pelita V sudah mendekati ideal (Qori'atunnadyah, 2022).

4.2 Kebijakan Pendidikan Era Pelita V

Kebijakan pemerintah mengenai pembangunan pendidikan di dalam Repelita V dijalankan secara sinergis di setiap wilayah. Pokok dan langkah kebijaksanaan yang ada dalam Repelita V menjadi pedoman pembangunan di daerah Kota Pekalongan sebagai bagian wilayah NKRI melaksanakan

BAB 5

EPILOG

Secara luas, ulasan dalam buku terdapat beberapa kesimpulan antara lain, pertama, titik tekan aspek pembangunan pendidikan ada pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Jenjang tersebut merupakan jenjang yang sangat mendasar. Sebagai pondasi, pembenahan pendidikan harus dimulai dari jenjang dasar dan menengah, terutama dalam hal pemerataan. Berdasarkan GBHN 1988 terdapat dua tujuan dalam pembangunan di masa PELITA V, yaitu meningkatkan taraf hidup, kecerdasan, dan kesejahteraan seluruh rakyat secara merata dan meletakkan landasan yang kuat untuk tahap pembangunan selanjutnya. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa salah satu fokus pembangunan pada masa ini adalah pendidikan. Dengan berpedoman pada rencana pembangunan pemerintah pusat dan kondisi lokal, Pemerintah Kotamadya Pekalongan mengeluarkan kebijakan pembangunan pendidikan. Kebijakan ini pada dasarnya berbasis pada peningkatan kuantitas aspek Pendidikan, terutama pada jumlah sekolah, guru, dan murid. Hal demikian merupakan indikator “sederhana” untuk melihat aspek pembangunan yang terjadi di suatu wilayah. Berbasis kebijakan ini, maka didapatkan gambaran mengenai dinamika pembangunan Pendidikan di Kota Pekalongan secara kuantitatif.

Kedua, jenjang dalam pembangunan pendidikan di Kota Pekalongan pada PELITA V dapat dirinci menjadi tiga tingkat secara formal, yaitu tingkat pendidikan dasar, lanjutan pertama, dan lanjutan atas, baik yang dikelola oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan serta Pemerintah Daerah, serta

yang dikelola oleh Departemen Agama. Tingkat pendidikan dasar (formal) berupa Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah (MI). Tingkat pendidikan lanjutan pertama berupa, yaitu SMTP/SLTP umum, dan SLTP kejuruan, serta Madrasah Tsanawiyah (MTs). Tingkat pendidikan lanjutan atas berupa SMTA/SLTA umum, dan SMTA/SLTA kejuruan, serta Madrasah Aliyah (MA). Untuk mengetahui kondisi umum pembangunan pendidikan pada ketiga tingkatan itu dapat dilihat dari tiga komponen utama pendidikan (secara kuantitatif), yaitu sekolah, murid, dan guru serta bagaimana rasio antara guru dan murid untuk menentukan tingkat keberhasilan dalam proses pendidikan.

Ketiga, kondisi pendidikan di Kota Pekalongan pra PELITA V, dilihat dari aspek jumlah sekolah, guru, dan murid, secara umum mengalami fluktuasi. Jenjang SD/ sederajat di Kota Pekalongan memiliki jumlah sekolah, guru dan murid terbanyak jika dibandingkan dengan jenjang SMTP dan SMTA/ sederajat. Yang menarik, jumlah siswa yang menempuh sekolah, baik di SD/MI, SMTP/MTs, dan SMTA/MA ternyata jumlahnya tidak sampai setengah dari jumlah anak usia sekolah di tahun yang sama. Artinya, terdapat *problem* partisipasi sekolah (formal) di Kota Pekalongan pada pra PELITA V.

Keempat, pembangunan pendidikan di tingkat dasar pada PELITA V di Kota Pekalongan berjalan dengan baik, meski terjadi ketimpangan, terutama pada aspek jumlah guru di sekolah negeri berbanding sekolah swasta. Rasio guru dan murid pada seluruh jenjang Pendidikan selama Pelita V dapat dikategorikan mendekati ideal. Di tingkat menengah pertama (SMTP/ sederajat), pembangunan yang dilakukan cenderung stagnan. Yang perlu diperhatikan, hal demikian mengakibatkan terjadinya fluktuasi rasio guru dan murid. Sebagaimana data,

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, T. (Ed.). 2005. *Sejarah Lokal di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Alam, F. N., & Sarimaya, F. 2017. WIDJOJONOMICS SAMPAI HABIBIENOMICS. *FACTUM*, 6(2), 203-216.
- Anwar, S. (2010). *Pendidikan di Indonesia: Antara Kebijakan dan Realitas*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- ARDITYA, Prayogi. Pers dan Pergerakan: Membaca Sikap Politik Surat Kabar Fajar Asia 1927-1930. 2023.
- Asa, K. 2006. *Batik Pekalongan dalam Lintasan Sejarah*. Jakarta: Paguyuban Pecinta Batik Pekalongan.
- Asa, K., & Yahya, M. L. 2021. *Sejarah Pekalongan (Pekalongan History)*. Pekalongan: Yayasan Peduli Sejarah Indonesia.
- Bandiyono, S., & Indrawardani, K. F. 2010. Tinjauan Migrasi Penduduk Desa-Kota, Urbanisasi dan Dampaknya. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, V(1), 41-54.
- Badan Pusat Statistik. 1988. *Kotamadya Pekalongan Dalam Angka 1987*. Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. 1989. *Kotamadya Pekalongan Dalam Angka 1988*. Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. 1990. *Kotamadya Pekalongan Dalam Angka 1989*. Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. 1991. *Kotamadya Pekalongan Dalam Angka 1990*. Badan Pusat Statistik.

- Badan Pusat Statistik. 1992. *Kotamadya Pekalongan Dalam Angka 1991*. Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. 1993. *Kotamadya Pekalongan Dalam Angka 1992*. Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. 1994. *Kotamadya Pekalongan Dalam Angka 1993*. Badan Pusat Statistik.
- Bappeda Kotamadya Pekalongan. 1989. *Rencana Pembangunan Lima Tahun ke Lima; Kotamadya DT II Pekalongan (1989/1990-1993/1994) Buku II Rencana Sektor Pembangunan*.
- Bappenas. 1989. *REPELITA V Buku II*. Jakarta: Bappenas.
- Blackburn, S. (2004). *Women and the State in Modern Indonesia*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Budiman, A. 1996. *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Cahyaningsih, G. D. 2016. LATAR BELAKANG WAJIB BELAJAR MASA ORDE BARU TAHUN 1984. *AVATARA: Jurnal Pendidikan Sejarah*, 4(3), 979-989.
- Datumula, S. 2020. PERATURAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN DI INDONESIA PADA MASA ORDE LAMA, ORDE BARU, REFORMASI, DAN KABINET KERJA. *Moderasi: Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial*, 1(2), 56-78.
- Darmaningtyas. (2004). *Pendidikan yang Memiskinkan*. Yogyakarta: Galang Press.
- Dirhamsyah, M. 2014. *Pekalongan Yang (Tak) Terlupakan*. Pekalongan: Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Pekalongan.

- Haris, S. 1991. *PPP dan Politik Orde Baru*. Jakarta: Grasindo.
- Herlina, N. 2008. *Metode Sejarah*. Bandung: Satya Historika.
- Hidayat, S. 2004. Paradigma Pembangunan dan Kapabilitas Aparatur. *Wacana Kinerja*, 7(4), 17-24.
- Huda, K. 2016. PROBLEMATIKA MADRASAH DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN ISLAM. *Dinamika Penelitian*, 16(2), 309-336.
- Huraerah, A. 2008. *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat: Model & Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan*. Bandung: Humaniora.
- Ismail. 2014. ANALISIS ARAH KEBIJAKAN PELAKSANAAN WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN YANG MERATA DAN BERKUALITAS DI KOTA MAKASSAR. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(1), 15-29.
- Jones, G. W., & Hull, T. H. (1997). *Indonesia Assessment: Population and Human Resources*. Canberra: Australian National University.
- Kotamadya Pekalongan. 1989. *Rencana Pembangunan Lima Tahun ke Lima; Kotamadya DT II Pekalongan (1989/1990-1993/1994) Rencana Sektor Pembangunan*. Pekalongan: Bappeda Kotamadya Pekalongan.
- Kuntowijoyo. 2003. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Leirissa, R., Ohorella, G., & Tangkilisan, Y. B. 1996. *Sejarah Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI.

- Mayrudin, Y. M. 2018. MENELISIK PROGRAM PEMBANGUNAN NASIONAL DI ERA PEMERINTAHAN SOEHARTO. *JURNAL OF GOVERNMENT - JOG (Kajian Manajemen Pemerintahan & Otonomi Daerah)*, 4(1), 71-90.
- Meriyati. 2015. *Memahami Karakteristik Anak Didik*. Bandar Lampung: Fakta Press IAIN Raden Intan Lampung.
- Moehadi, Surojo, A. D., Jamin, J., K, T. P., Ngga, D. N., & Bahun, T. D. 1981. *SEJARAH PENDIDIKAN DAERAH JAWA TENGAH*. Jakarta: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Pemerintah Kota Pekalongan. 2006. *Penelusuran Hari Jadi Kota Pekalongan*. Pekalongan: Pemerintah Kota Pekalongan.
- Piliang, M. Z. 2023. PENGELOLAAN EKONOMI INDONESIA: PENGALAMAN ORDE BARU. *ATTANMIYAH : JURNAL EKONOMI DAN BISNIS ISLAM*, 2(1), 207-238.
- Putri, P. K., Hubeis, A. V., Sarwoprasodjo, S., & Ginting, B. 2019. KELEMBAGAAN DAN CAPAIAN PROGRAM KELUARGA BERENCANA (KB): DARI ERASENTRALISASI KE DESENTRALISASI. *JURNAL KEPENDUDUKAN INDONESIA*, 14(1), 1-12.
- Qori'atunnadyah, M. 2022. Pengelompokan Wilayah Berdasarkan Rasio Guru-Murid Pada Jenjang Pendidikan Menggunakan Algoritma K-Means. *Journal of Informatics Development*, 1(1), 33-38.
- Rahmawati, R. 2022. REPELITA: SEJARAH PEMBANGUNAN NASIONAL DI ERA ORDE BARU. *ETNOHISTORI: Jurnal Ilmiah Kebudayaan dan Kesejarahan*, IX(2), 36-42.

- Ricklefs, M. 2001. *A History of Modern Indonesia since c. 1200*. Basingstoke: Palgrave.
- Safei, & Hudaidah. 2020. Sistem Pendidikan Umum Pada Masa Orde Baru (1968-1998). *Jurnal Humanitas*, 7(1), 1-13.
- Sabana, C. 2007. *ANALISIS PENGEMBANGAN KOTA PEKALONGAN SEBAGAI SALAH SATU KAWASAN ANDALAN DI JAWA TENGAH*. Semarang: Tesis Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
- Sabana, C. (2007). *Pekalongan dalam Perspektif Sejarah dan Budaya*. Semarang: Universitas Diponegoro Press.
- Sari, M., & Purhadi. 2021. PEMODELAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA PROVINSI JAWA BARAT, JAWA TIMUR DAN JAWA TENGAH TAHUN 2019 DENGAN MENGGUNAKAN METODE REGRESI LOGISTIK ORDINAL. *JURNAL GAUSSIAN*, 10(1), 149-158.
- SARNOTO, Ahmad Zain, et al. *Landasan Ilmu Pendidikan*. 2023.
- Siagian, S. P. 1982. *Administrasi Pembangunan; Konsep, Dimensi, dan Strateginya*. Jakarta: Gunung Agung.
- Simanjuntak, P. 2000. *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Siswati, E., & Hermawati, D. T. 2018. ANALISIS INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) KABUPATEN BOJONEGORO. *Jurnal Ilmiah SosioAgribis*, 18(2), 93-114.
- Sudriamunawar, H. 2002. *Pengantar Study Administrasi Pembangunan*. Bandung: Mandar Maju.

- Sujatmoko, E. 2010. Hak Warga Negara Dalam Memperoleh Pendidikan. *Jurnal Konstitusi*, 7(1), 181-211.
- Supriyoko. 1994. Peningkatan Penyelenggaraan SLTP Keterampilan. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 1(1), 44-52.
- Suryo, D. 2009. *TRANSFORMASI MASYARAKAT INDONESIA DALAM HISTORIOGRAFI INDONESIA MODERN*. Sleman: STPN Press.
- Tilaar, H. A. R. (1995). *Pendidikan, Kebudayaan, dan Masyarakat Madani Indonesia*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Yaniariza, N., Fairuz, S., & Yunita, S. 2022. Analisis Penyebab Rendahnya Relevansi Pendidikan dengan Tuntutan Masyarakat. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 9752-9759.

BIODATA PENULIS



Arditya Prayogi

Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Penulis lahir di Palembang pada tanggal 18 September 1987. Penulis adalah tenaga teknis pada Perpustakaan UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis menempuh pendidikan tinggi di bidang Ilmu Sejarah di salah satu PTN di Bandung. Penulis menekuni bidang tulis menulis sebagai bagian dari salah satu profesi yang ditekuni. Penulis dapat dihubungi lewat surel arditya.prayogi@uingusdur.ac.id

PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH KOTA PEKALONGAN DI ERA ORDE BARU

Dalam sejarah, data-data kuantitatif pembangunan dapat digunakan sebagai salah satu data penting dalam membangun suatu historiografi. Buku ini bertujuan untuk merekonstruksi sejarah pembangunan Pendidikan umum dengan memanfaatkan data-data kuantitatif yang ada di Kota Pekalongan pada masa Pelita V (1989-1994). Kota Pekalongan sendiri merupakan kota penting yang pernah menjadi ibukota Karesidenan Pekalongan yang diproyeksikan sebagai kota perdagangan yang dengannya aspek Pendidikan menjadi penting untuk dibangun. Buku ini merupakan suatu historiografi yang memberikan gambaran hasil bahwasanya kondisi Pendidikan umum di Kota Pekalongan pada Pelita V, dilihat aspek jumlah sekolah, guru, dan murid, secara umum mengalami fluktuasi/dinamika.



GORESAN PENA
(Anggota IKAPI)

www.goresanpena.biz.id

085 2214 2241 6

goresanpena2012@gmail.com

Office :
Jl. Jami no. 230 Sindangjawa - Kadugede
Kuningan - Jawa Barat 45561
Phone : 085-221-422-416

Co. Office :
Blok Benda 03/07
Kejuden - Depok - Cirebon 45653

